
Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan

Erwin

STMIK Amika Soppeng
Jl. Tujuh Wali-wali Watansoppeng
Email : Erwin@amiklps.ac.id

ABSTRAK

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Desain penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan 72 data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan, begitu juga dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun saran yang diberikan yaitu hendaknya Pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan cara memperbanyak sosialisasi.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The Effect of Motorized Vehicle Tax (PKB) and Motorized Vehicle Ownership Fee (BBN-KB) on Regional Original Income through Taxpayer Compliance in South Sulawesi Province. Advisory Commission The purpose of this study was to determine and analyze the effect of Motorized Vehicle Tax (PKB) and Motorized Vehicle Ownership Fee (BBN-KB) on Regional Original Income (PAD) through Taxpayer Compliance in South Sulawesi Province. The research design used is a quantitative approach. This research was conducted at the Regional Revenue Agency Office of South Sulawesi Province. With a population of 72 Panel. The data analysis technique used is path analysis. The results showed that Motor Vehicle Tax had positive and no significant effect on the District's Natural Income through Compulsory Tax Compliance in the South Sulawesi Province, nor did the Bea Balik Name of Motor Vehicles have a positive and not significant effect on the District's Natural Income through Compulsory Tax Compliance in the South Sulawesi Propinsi. The advice given is that the Government should strive to further increase regional tax revenues, especially Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motorized Vehicles by increasing socialization.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Motorized Vehicle Title Transfer Fee, Taxpayer Compliance, Local Own Revenue.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber pendanaan dalam pelaksanaan tanggungjawab Negara dalam mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga Negara dengan pemerintah. Pajak Daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan besaran pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan memiliki kendaraan bermotor maka itu akan berdampak pula pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Dan dengan penetapan tarif BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) bagi penyerahan pertama dan 1% (satu persen) bagi penyerahan kedua dan seterusnya. Kendaraan Bermotor yang jumlahnya semakin meningkat menjadikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) akan semakin banyak, dengan semakin banyaknya masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan membeli kendaraan

baru maka peran PKB dan BBN-KB akan memiliki peran penting dan masukan yang cukup besar, namun sesuai dengan Laporan Realisasi Penerimaan UPT Pendapatan Tahun 2021 untuk realisasi disektor PKB dan BBN-KB tidak mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang patuh dalam membayar pajak, seperti menunggak pembayaran pajak, bahkan ada yang memang kurang peduli terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga hal tersebut tentu berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini lah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai kepatuhan wajib pajak baik dari aspek internal maupun eksternal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan agar Kepatuhan Wajib Pajak kedepannya bisa lebih baik lagi. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan penyisiran penunggak pajak kendaraan bermotor dengan berbagai cara kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan layanan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Pelayanan bisa dilakukan di beberapa tempat untuk memudahkan transaksi pembayaran yaitu Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Kecamatan, Gerai Samsat dan yang paling baru Samsat Digital. Pelayanan yang diberikan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan adanya banyak layanan tersebut maka akan membantu dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi pembayaran pajak kendaraan dan pengurusan yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi

Selatan melalui kepatuhan wajib pajak?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan.

LANDASAN TEORI

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Indikator PKB dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Setiap UPT Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2021.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Indikator Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap UPT Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

4. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dari setiap UPT Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2021.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivistic (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Badan Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 72 Data Panel. Dengan menggunakan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. (Pradana and Reventiary 2016) Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 data Panel dari data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Data Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Data Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2019-2021.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi yang berjumlah 24 UPT.(Pradana and Reventiary 2016)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan informan penelitian.
2. Dokumentasi dengan mencatat dan menelusuri data Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang bisa diakses pada situs Resmi Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan kedalam unit-unit,melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,2014)

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS versi 22 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

b. Uji Sub Struktur 1

Tujuan penggunaan analisis jalur dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Perhitungan statistik dalam analisis jalur menggunakan analisis regresi yang digunakan sebagai alat

dalam penelitian ini dan dibantu dengan menggunakan SPSS 22.

Hasil uji analisis pada persamaan sub struktur 1 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sub Struktur 1

| Coefficients ^a | | Standarized Coefficients | | t | Sig. |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------|--------|
| Unstandardized Coefficients | | Std. Error | | | |
| Model | B | | Error | Beta | |
| 1 (Constant) | 118648.17166563 | | 1074149.890146 | | 11.046 |
| | PKB_X1 | .023 | .023 | .283 | 1.031 |
| | BB_N_X2 | .119 | .050 | .649 | 2.367 |

c. Dependent Variable: KWP_Z

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan jalur yang diperoleh yaitu : $Y = 0,283 X_1 + 0,649 X_2 + e_1$

1) Koefisien Variabel Pajak Kendaraan Bermotor
 Nilai variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) sebesar 0,283 memberi makna bahwa apabila Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Selatan bertambah 1 poin, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Propinsi Sulawesi Selatan akan meningkat sebesar 0,283, begitu juga sebaliknya.

2) Koefisien Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Nilai variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) sebesar 0,649 memberi makna bahwa apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Selatan bertambah 1 poin, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Propinsi Sulawesi Selatan akan meningkat sebesar 0,649, begitu juga sebaliknya.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji determinasi di atas, menunjukkan nilai dari r^2 sebesar 0,862. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 86,2% sementara sisanya 13,8% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Sedangkan rumus $e_1 = \sqrt{1 - R^2}$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,862} = 0,371$$

Sedangkan hasil uji koefisien determinasi model 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Uji Koefisien Determinasi Model 2

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .959 ^a | .919 | .916 | 85342388810.327 |

a. Predictors: (Constant), KWP_Z, PKB_X1, BBN_X2

Berdasarkan hasil uji determinasi di atas, menunjukkan nilai dari r^2 sebesar 0,919. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 91,9% sementara sisanya 8,1% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Sedangkan rumus $e_2 = \sqrt{1 - R^2}$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,919} = 0,285$$

b. Pembahasan
Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor

mempunyai arah koefisien positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti bahwa

Model Summary

| Model | R | Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .929 ^a | .862 | .858 | 6085182218.271 |

a. Predictors: (Constant), BBN_X2, PKB_X1

apabila Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat juga dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada Propinsi Sulawesi Selatan. Masih banyak terjadi keterlambatan pembayaran pajak atau bahkan tidak membayar pajak sehingga kejadian ini berdampak pada perkembangan daerah karena kurang sadarnya masyarakat dalam membayar pajak. Banyak yang beranggapan bahwa dengan membayar pajak mereka jadi rugi, karena mengira bahwa hanya orang-orang yang berkuasa saja yang dapat menikmati hasil pajak. Padahal mereka keliru, dengan membayar pajak tepat waktu justru akan berdampak baik bagi kehidupan mereka juga.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Riswantodkk (2020) menyebutkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Mamuju. Walaupun masih termasuk dalam kategori baik tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa indikator yang perlu diberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan, menyiapkan dokumen untuk membayar pajak, bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak dan perlunya sosialisasi yang harus sering dilakukan menyangkut kepatuhan dan kewajiban membayar pajak agar para wajib pajak mempunyai kesadaran lebih dalam membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai arah koefisien positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat juga dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Dari hasil analisis regresi pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada Propinsi Sulawesi Selatan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai arah koefisien positif dengan Pendapatan Asli Daerah, yang berarti bahwa apabila Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat jugadengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Dari hasil analisis regresi pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah pada Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian

sebelumnya yang ditulis oleh NimasGaluhSavitri (2021) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan ternyata tidak diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan setiap tahun pemilik kendaraan diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut merupakan penghasilan dari Pajak Daerah yang ikut serta mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin berpengaruh terhadap realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian MargarethaAnggraini, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Saidi (2010,51), pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi, pengertian pajak kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 12 undang-undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasa wajib pajak.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai arah koefisien positif dengan Pendapatan Asli Daerah, yang berarti bahwa apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat juga dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah pada Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti besar kecilnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil ini juga sama dengan penelitian sebelumnya oleh Pangesti (2020) menyebutkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan hasil penelitian Cindy Yudhita Sari (2020) menyebutkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang memilih membeli kendaraan bekas yang dibarengi dengan pengajuan balik nama kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan. Minat masyarakat terhadap kendaraan bekas di Propinsi Sulawesi Selatan sangat tinggi, hal ini yang menyebabkan pengajuan untuk balik nama kendaraan di Propinsi Sulawesi Selatan meningkat. Sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Semakin banyaknya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor maka pabrik yang membuat dan menghasilkan kendaraan bermotor menyediakan beragam jenis dan keunggulan yang berbeda disetiap kendaraan bermotor, maka para konsumen memiliki keinginan atau daya beli yang cukup tinggi untuk membeli atau mengganti kendaraan bermotor yang mereka miliki sehingga banyak masyarakat yang melakukan jual beli kendaraan bermotor. Dengan demikian masyarakat diharuskan membayar pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, maka akan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai arah koefisien positif dengan Pendapatan Asli Daerah, yang berarti bahwa apabila Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat juga dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.

Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah pada Propinsi Sulawesi Selatan

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian MaristianaAyudkk (2022) menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, walaupun demikian kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan agar lebih memaksimalkan pendapatan daerah.

Menurut Yadnyana dan Sudiksam 2011 kepatuhan wajib pajak merupakan sikap pada fungsi pajak, konstelasi dari komponen kognitif, efektif yang mempunyai interaksi memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap pemenuhan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembayar pajak dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan negara, selain itu kepatuhan wajib pajak juga bisa menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak selain bersifat wajib, pajak juga bersifat memaksa. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting karena Indonesia memiliki sistem perpajakan *Self Assessment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adapengaruh yang positif

dan tidak signifikan variabel pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah melalui kepatuhan wajib pajak Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan masih rendah hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak pada pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Begitupun sebaliknya apabila penerimaan pajak kendaraan bermotor tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan naik dan akan berdampak pada pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dimana pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui kepatuhan wajib pajak di Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya kepatuhan wajib pajak, maka pajak kendaraan bermotor akan meningkat yang berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Pajak merupakan suatu kewajiban dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah daerah khususnya Propinsi Sulawesi Selatan untuk berbagai tujuan misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, balas jasa untuk suatu pelayanan dan keamanan dan juga mengatur konsumsi masyarakat.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli

daerah melalui kepatuhan wajib pajak Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada Propinsi Sulawesi Selatan melalui kepatuhan wajib pajak masih rendah sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Begitupun sebaliknya apabila penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak tinggi, akan berdampak pada tingginya pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dimana pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui kepatuhan wajib pajak di Propinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pajak bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Peningkatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh transaksi jual beli kendaraan bermotor di Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan semakin banyak konsumen membeli kendaraan bermotor bekas di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor akan meningkat. Dengan adanya peningkatan penerimaan bea balik nama maka secara otomatis pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan akan meningkat, sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui kepatuhan wajib pajak di Propinsi

Sulawesi Selatan. Bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui kepatuhan wajib pajak di Propinsi Sulawesi Selatan.

Adapun saran Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya untuk lebih meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta tidak mempersulit dalam melakukan pengurusan pajak kendaran bermotor dan bea balik nama.

DAFTAR PUSTAKA

Aliah, Nurul, Abubakar Hamzah, And Muhammad Nasir. 2019. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*.

Atteng, Apriliani Grecia Kartini, Josep Bintang Kalangi, And Jacline I. Sumual. 2019. "Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19:107.

Auliah, A. Nurfahmi, Muhtar Sapiri, And Muh. Idris. 2018. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Takalar Oleh." *Journal* 4(003):1-56.

Gustaviana, Sandy. 2020. Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor.

Hadi, Seno Sudarmono, And Restiyana Dyah Ayu Saputri. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta." 5.

Ilham, R., Asri Aditya, ; Zulfanetti, And ; Heriberta. 2021. *Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi*. Vol. 16.

Indonesia, Pemerintah. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Sekretaris Negara Republik Indonesia* 68.

Indonesia, Pemerintah. 2009. "Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi." 32.

Indonesia, Pemerintah. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 147.

Indonesia, Pemerintah. 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pememerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." (104172):43.

Islami, Debby, And Lilik Rahmawati. 2020. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017." 176.

Karina, Nurul, And Novi Budiarmo. 2016. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Analysis." 722.

Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018*. 2018th Ed. Edited By Maya.

Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Maznawaty, Elvi Syahria, Ventje Ilat, And Inggriani Elim. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara The Analysis Of Tax Revenue Increase In The Province Of North Maluku.
- Niaya, And Danisya. 2022. "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Sosial Dan Sains* 736.
- Pangesti, Anggaraeni Niken. 2020. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb), Dan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Jawa Tengah." 135.
- Panggabean, Fitri Yani, And Desti Rinika. 2020. "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Upt Medan Utara Fitri."
- Pontoh, Irene. ..., Ilat Ventje, And Jessy Warogan. 2022. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Vehicle Tax (PKB) And Title Transfer Fee Of Motor Vehicle (BBN-KB), Original Regional Revenue.
- Pradana, Mahir, And Avian Reventiary. 2016. "Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Customade (Studi Di Merek Dagang Customade Indonesia)." *Jurnal Manajemen* 6:1-10.
- Sari, Rioni Yunita. 2022. "Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah1." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Doi: 10.31604/jips.V9i1.2022.396-401.
- Savtri, Galuh Nimas, And Yunita Ary Anggraeni. 2021. "Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019 Nimas." *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet.1. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sulawesi Selatan, Pemerintah. 2017. "Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah." *Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* 26.
- Sulawesi Selatan, Pemerintah. 2020. "Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas." 10.
- Valen Ipu, Reinhard, Herman Karamoy, Wulan D. Kindangen, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, And Jl Kampus Bahu. 2022. *The Contribution Of Motor Vehicle Tax To The Increase In Local Revenue In The Talaud. Archipelago District*. Vol. 5.
- Winarso, Widi. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Cp Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii)*. Jakarta.
- Yanti, Fitri, Sri Fitria, Jayusman Program, Studi Akuntansi, And Fakultas Ekonomi. 2021. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara." 4(3):280-93. Doi: 10.30596/Liabilities.V4i3.8375.